

Judul : Longsor batu tulis, komisi V inginkan solusi permanen
Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Longsor Batu Tulis

Komisi V Ingin Solusi Permanen

KETUA Komisi V DPR Lasarus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana longsor di kawasan Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Penanganan bencana infrastruktur tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis maupun koordinasi antar lembaga.

Lasarus bilang, longsor di Batu Tulis berdampak langsung pada mobilitas warga. Jalan yang sebelumnya bisa dilalui kendaraan roda empat kini hanya dapat dilewati sepeda motor. Karena itu, solusi permanen mutlak diperlukan agar akses masyarakat tetap terjaga.

"Saya berharap ini dikoordinasikan. Jangan sampai hal-hal non-teknis menghambat penyelesaian persoalan. Harus cepat dicarikan titik temunya," ujar Lasarus saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Batu Tulis, Rabu (17/9/2025).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut sudah menyiapkan anggaran perbaikan, sementara Pemerintah Kota Bogor menyediakan lahan sekitar 2-4 hektare untuk pembangunan jalan baru. Lasarus menekankan, proyek ini harus dikawal bersama Ditjen Bina Marga

Kementerian PUPR, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan aparat terkait agar berjalan cepat.

Selain akses jalan, ia juga menyoroti ancaman pergerakan tanah serta jalur air di sekitar lokasi yang berpotensi merusak infrastruktur vital, termasuk jalur rel kereta api Bogor-Sukabumi. Jalur tersebut sangat penting bagi transportasi publik dan distribusi logistik, dengan jumlah penumpang KA Pangrango yang terus meningkat setiap tahun.

"Penanganan teknis nanti dibantu Bina Marga, tapi pembiayaannya tentu dari KAI. Fasilitas ini harus berfungsi optimal karena menyangkut kepentingan publik yang luas," tegas politikus PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menambahkan, kajian teknis menyeluruh harus dilakukan untuk menangani dampak longsor. Proyek underpass yang sebelumnya dimaksudkan untuk memperlancar mobilitas justru menimbulkan persoalan baru karena tidak memperhitungkan kontur tanah dan kondisi geologi setempat.

"Ini daerah dengan banyak mata air, curah hujan tinggi, dan



Lasarus

tanah bergerak. Kalau tidak dikaji mendalam, hasilnya seperti sekarang. Niatnya baik, tapi malah menimbulkan masalah," ujar legislator Fraksi NasDem itu.

Roberth mengingatkan, setiap pembangunan wajib didukung kajian laboratorium serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tanpa itu, risiko merugikan masyarakat sangat besar.

Ia juga menekankan, pergerakan tanah di Batu Tulis bisa

berdampak lebih luas, bukan hanya pada jalan dan jalur kereta, tetapi juga situs sejarah Istana Batu Tulis. "Ini harus ditangani menyeluruh, bukan cuma jalan. Situs sejarah kita juga harus dilindungi," tandasnya.

Senada, anggota Komisi V DPR A Bakri HM menegaskan perlunya solusi permanen. Pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan anggaran rutin untuk perbaikan sementara yang

hanya menguras dana tanpa menyelesaikan akar masalah.

"Kalau hanya perbaikan sementara, tiap tahun anggaran habis tapi masalah tidak selesai. Perlu perencanaan matang agar ada solusi permanen," tegas politikus PAN itu.

Bakri juga menyoroti nilai sejarah kawasan tersebut yang terkait peninggalan Kerajaan Pajajaran, serta vitalnya jalur kereta api dan akses jalan bagi mobilitas masyarakat Bogor sebagai kota penyangga Jakarta. Komisi V DPR akan mengawal usulan anggaran infrastruktur di kawasan rawan longsor tersebut.

"Jangan hanya proyek rutinitas. Kita ingin ini jadi program Pemerintah yang menyelesaikan masalah, bukan menambah pekerjaan tiap tahun," ujarnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang Januari-Juli 2025 terjadi lebih dari 50 kejadian tanah longsor di Jawa Barat, dengan Bogor dan Sukabumi sebagai daerah paling sering terdampak. Kompleksitas topografi berbukit serta kepadatan penduduk menambah urgensi percepatan penanganan di kawasan ini. ■ PYB